

**FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
DALAM MENGELOLA KAWASAN WISATA HUTAN ZAMRUD
TAHUN 2013 – 2015**

Kartini

Email : thinie_violet@yahoo.com

Pembimbing : Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The potential of the Siak diversity of potential tourist objects makes Siak has promising prospects for tourism development. In a sense, the tourism product is a potential vary widely in marketing and determining the travel market segmentation so that tourists visiting the Siak could increase. Management and development based on local regulation number 12 of 2012 on Regional Tourism Development Master Plan, especially at points Siak Nature emerald forest tourist area has great potential to be made tourist attractions.

This research uses descriptive analysis method using a qualitative approach, which is located in Siak district with a focus on the factors - factors that constrain District Government Siak manage tourist area of forest emerald by the Department of Tourism, Youth and Sports towards tourism forest of 38,000 potentially huge as tourist attraction.

Based on this research can be concluded Siak district government through the Department of Tourism, Youth and Sports in implementing tugas and functions to develop and manage natural attractions emerald forest area is not maximized. It can be seen from four variables inhibiting factor, namely the budget, infrastructure, partnerships and human resources.

Keyword : *Inhibiting Factors, Nature, Zamrud Forest*

Pendahuluan

Kabupaten Siak merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam, nilai sejarah, seni dan budaya, serta memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan

untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya melayu, serta pembangunan ekonomi lokal. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk melestarikan potensi alam yang ada, maka Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Siak, dengan menimbang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dimana pariwisata, seni, budaya, dan Olahraga dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah melakukan pengembangan dan pembangunan urusan pariwisata, seni, budaya, pemuda dan olahraga.

Sebutan zamrud sendiri diambil dari keelokan tempat tersebut, terutama jika dilihat dari udara. Pantulan airnya yang berwarna hitam di tengah hutan rawa menyerupai permata berwarna hijau, bukan itu saja warga desa setempat sering juga menyebut dua danau ini (Danau Pulau Besar dan Danau Bawah) dengan nama Danau Zamrud. Di tempat itulah hidup satwa dan tumbuhan selama ratusan tahun. Sejumlah satwa terkenal masih hidup diantaranya ikan arwana emas (*Schleropages formasus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*), beruang merah (*Helarctos malayanus*), burung serindit (*Loriculus galgulus*), serta berbagai jenis ular.

Kepariwisataan di Kabupaten Siak memang mulai berkembang dengan mengandalkan fakta kesejarahan dan potensi budaya beserta objek wisata yang telah dikenal ke mancanegara. Salah satu yang paling dikenal dari objek wisata

yang ada di Kabupaten Siak yaitu wisata Kerajaan Siak sebagai objek wisata andalan yang menjadi daya tarik yang paling bersejarah. Akan tetapi wisatawan nusantara dan khususnya mancanegara masih terpusat di objek wisata Kerajaan Siak Sri Indrapura dan belum tersebar ke objek wisata lainnya, padahal masih banyak objek wisata yang dapat dinikmati khususnya di di sector wisata alam. Hal ini perlu perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintah Kabupaten Siak khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan objek wisata utama dan objek wisata pendukung lainnya agar wisatawan yang datang ke Kabupaten Siak juga mengenal Siak tidak hanya dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kemudian dapat kita lihat melalui tabel berikut mengenai jumlah wisatawan yang mengunjungi wisata di Kabupaten Siak :

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Siak Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah Wisatawan Lokal (orang)	Persentase
2013	70	34.653	26%
2014	151	52.891	40%
2015	182	45.794	34%
Jumlah	403	133.338	100%

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah

kunjungan dari tahun 2013 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 70 orang, wisatawan lokal sebanyak 34.653, mengalami kenaikan jumlah kunjungan pada tahun 2014 pada wisatawan mancanegara sebanyak 151 dan wisatawan lokal 52.891, tahun 2013 jumlah wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan sebanyak 182 dan sedangkan wisatawan lokal mengalami penurunan 45.794 walaupun masih dalam tren positif dan tidak lebih kurang dari jumlah kunjungan pada tahun 2013.

Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Siak dari tahun 2013-2015 jumlah kunjungan tersebut belumlah memuaskan. Tentu permasalahan ini disebabkan karena belum terbenahnya permasalahan dan tertatnya sarana serta prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Siak, kemudian masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pariwisata yang mengakibatkan daya saing pariwisata Kabupaten Siak masih rendah, pemasaran pariwisata yang belum tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan, serta fasilitas penunjang kepariwisataan di Kabupaten Siak yang belum memadai.

Seharusnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Siak akan keragaman potensi objek wisata yang ada, Siak memiliki prospek yang menjanjikan dalam pengembangan pariwisata. Dalam arti, produk wisata yang beragam merupakan sebuah potensi dalam pemasaran secara luas dan menentukan segmentasi pasar wisata sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Siak bisa meningkat.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

mengangkat masalah mengenai “Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengelola Kawasan Wisata Hutan Zamrud Tahun 2013 – 2015 ”.

Tinjauan Pustaka

Peran Pemerintah

Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak

tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Implementasi Kebijakan

Edwards III (dalam Budi Winarno, 2013:177) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*Transimisi*), kejelasan informasi (*Clarity*) dan konsistensi informasi (*Consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (Disposition)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya

apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak tepatnya yang membawahi tentang pengelolaan pariwisata kawasan hutan zamrud. Teknik analisa data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, data dan semua yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan wisata pada Danau Besar dan Danau Bawah Di Hutan

Zamrud Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Pembahasan

Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengelola Kawasan Wisata Hutan Zamrud Tahun 2013 – 2015

1. Upaya Pemerintah Daerah Siak dalam Mengelola Kawasan Wisata Hutan Zamrud di Kabupaten Siak

a. Motivator

Motivator dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan agar pariwisata yang mulai di gerakkan bisa terus berjalan. Pemerintah memegang peran besar dalam membuat langkah awal sebagai motivator pariwisata agar nantinya berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di sektor wisata alam di Kabupaten Siak, dimana pemerintah daerah telah melakukan pengembangan objek wisata kawasan hutan zamrud sebagai objek wisata utama di sektor alam. Promosi dan peningkatan sumber daya manusia pun dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan memasarkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak. Akan tetapi pengembangan yang dilakukan belumlah maksimal sehingga membutuhkan keterlibatan elemen lain untuk memajukan potensi wisata ini.

b. Fasilitator

Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui penetapan peraturan serta membuat prosedur perencanaan. Peraturan dan perencanaan yang dimaksud pemerintah Kabupaten Siak harus mempunyai landasan dan aturan dalam menjalankan fungsinya yang nantinya diperlukan. Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak (RIPPDA) memberikan arahan agar pembangunan kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi daerah, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat baik ekonomi maupun sosial budaya Kabupaten Siak dan dapat mengantarkan Kabupaten Siak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu sesuai dengan visi Kabupaten Siak.

c. Dinamisor

Agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal maka pemerintah dengan masyarakat harus bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stackholder* memiliki peran untuk mensinergikan kedua pihak tersebut yaitu pemerintah dengan masyarakat. Kondisi lingkungan di kawasan wisata hutan zamrud bisa dilihat dari animo dari masyarakat setempat yang belum sadar akan hal itu, beberapa dari masyarakat masih belum tahu kalau hutan zamrud merupakan tempat wisata masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan zamrud terbut bukan bukan masyarakat yang bersifat menetap, mereka hanya menempati pondok sementara dalam hal menangkap ikan dan bermata pencaharian di tepian sungai atau danu. Desa dayun merupakan bagian dari kawasan hutan zamrud memiliki beberapa kepala keluarga yang bermukim secara sementara di kawasan hutan wisata zamrud.

2. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Siak dalam Mengelola Kawasan Wisata Hutan Zamrud

a. Komunikasi

Dalam variabel komunikasi yang terkait dalam hal ini ialah institusi pemerintah, swasta dan Masyarakat. Mekanisme sangat dibutuhkan untuk mengatur berbagai kepentingan secara operasional serta koordinasi agar memiliki efisiensi tinggi. Meningkatkan kapabilitas dan efektifitas institusi kelembagaan terhadap fungsi dan peran dalam pembangunan pariwisata khususnya wisata alam ditinjau dari aspek keterpaduan koordinasi dan interaksi yang sinergis antar stakeholder terkait.

Pola pengelolaan wisata alam di kawasan hutan zamrud memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis. *Stakeholder* yang dimaksud dalam hal ini iyalah peran pihak Badan Operasi Bersama (BOB) dalam mendukung pemerintah untuk mengelola kawasan wisata hutan zamrud dari segi serana dan prasarana, promosi, regulasi serta keterlibatan langsung dalam menarik pengunjung. Kawasan wisata hutan zamrud yang secara umum berada di kawasan BOB membuat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus berpikir supaya hal ini menjadi mudah dan terlaksana

b. Sumber Daya

Diperlukan adanya sosialisasi yang lebih maksimal guna meningkatkan sumber daya manusia baik itu pada masyarakat maupun implementator. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintah yang mempunyai keterkaitan dalam mengelola pariwisata belumlah maksimal yang dapat dilihat pada pengelolaan di setiap objek wisata khususnya wisata alam. Hal ini disebabkan kurangnya

sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat dan implementator.

Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya suatu program atau kegiatan adalah anggaran. Anggaran menjadi faktor penunjang segala bentuk program pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu akan mempengaruhi efektivitas suatu program dan bisa menjadi kendala apabila anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai.

Berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Siak yang perkembangan setiap tahunnya cukup pesat. Maka anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak cukup besar. Adapun anggaran dari APBD untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dan juga untuk pengelolaan serta pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Siak yang sudah di anggarkan didalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jumlah anggaran yang tersebut tergolong besar, seharusnya dapat meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Kabupaten Siak, terutama wisata alam yang baru mau di bangkitkan. Jika dilihat dari jumlah dana yang di kelola oleh Bidang Pariwisata diatas seharusnya Pemerintah Kabupaten Siak sangat mampu untuk melakukan pengembangan, penambahan dan pembaharuan wisata, namun pada pengerjaannya belum memadai untuk di sektor pariwisata alam. Karena beberapa tahun terakhir lebih terfokus ke wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Siak.

Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak menjadi masalah dalam hal pengelolaan pariwisata di sektor apaun karena setiap tahunnya memiliki jumlah yang sangat besar. Disini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak mengalami hambatan dalam penganggaran dari APBD, dengan jumlah anggaran yang besar harusnya Dinas Pariwisata bisa mengalokasikan anggaran terhadap objek wisata alam seperti penelitian yang mendalam serta perekrutan sumber daya manusia supaya pengelolaan wisata alam di kawasan hutan zamrud bisa lebih maksimal.

c. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor kebijakan memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Menurut data yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga telah membuat Program Pengelolaan Pariwisata Alam Kawasan Hutan Zamrud Tahun 2013-2018, namun dalam pelaksanaannya pada dua tahun terakhir tidak mengalami kemajuan dari perencanaan yang dari awal di tetapkan. Sementara program perencanaan pengelolaan tersebut hanya lima tahun sampai pada tahun 2018. Tentu saja hal ini menyebabkan Disposisi tidak berperan atau pemerintah Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan kebijakannya kurang antusias.

d. Struktur Birokrasi

Melihat pengelolaan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata selama ini masih memadukan pengelolaan pariwisata dengan Olahraga, hal ini tentu memberikan ketidakjelasan fokus dari birokrasi akan pengelolaan pariwisata. instansi pemerintah yang digabungkan tentu memberi hambatan terhadap kinerja dan keselarasan tujuan dari organisasi tersebut, seperti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Siak. Tidak heran selama ini pengelolaan pariwisata, khususnya wisata alam belum maksimal.

Kesimpulan

Dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di kawasan hutan zamrud oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak belumlah maksimal, hal ini terbukti dari hasil observasi penulis yang diantaranya :

1. Bentuk pengembangan pariwisata telah disahkan menjadi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak.
2. Jumlah dana yang dikelola oleh Bidang Pariwisata tergolong besar. Seharusnya Kabupaten Siak sangat mampu untuk melakukan pengembangan, penambahan dan pembaharuan wisata. Namun, pada pengerjaannya belum memadai untuk sektor pariwisata alam dan tidak adanya kejelasan berapa besarnya dana untuk pariwisata kawasan hutan zamrud.
3. Diperlukan pengemasan ulang (*re-packaging*) secara menyeluruh agar kawasan wisata hutan zamrud ini dapat di akses dengan mudah.
4. Belum efektifnya regulasi dalam rangka efektifitas pengembangan

dan pengendalian pembangunan pariwisata serta tidak berjalan dengan baik hubungan kemitraan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat membuat hal ini menjadi suatu penghambat.

Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sebaiknya di instansi Dinas Pariwisata lebih ditingkatkan lagi fasilitas pendukung kerja kemudian dalam menunjang peningkatan kelayakan dan kenyamanan wisatawan Dinas Pariwisata selaku dinas terkait lebih memfasilitasi.
2. Melihat dari bentuk Struktur Birokrasi Pemerintah yang ada di Kabupaten Siak, selama ini Dinas Pariwisata yang bertugas sebagai pengembang kepariwisataan di Kabupaten Siak digabungkan dengan urusan pemuda dan olahraga. Sehingga kondisi ini membuat ketidakfokusan pengembangan yang dilakukan oleh satu instansi tersebut. Seharusnya Dinas Pariwisata di pisahkan fungsi dan tugasnya terhadap Pemuda dan Olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Budi, Winarno, Prof. MA. PhD, 2013. *Kebijakan Publik (TOERI, PROSES, DAN*

- STUDI KASUS*), Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)
- Kacung Maridjan. 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muljadi A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Nugroho, Adi, 2008. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Studi Press
- Oka A, Yoeti. 2001. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: Paramita Pradnya.
- _____ 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Paramita Pradnya.
- Pitana I Gede dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Ando Offset.
- Siagian P Sondang. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Waluyo, 1994. *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*. (Studi Kasus Di Daerah Riau Kepulauan Propinsi Riau), Jakarta: Depdikbud.
- Widarta, I., 2005, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Bantul: Pondok Edukasi.
- William Dunn, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang otonomi daerah dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata..
- Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak.
- Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 53 Tahun 2012 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak.

Refferensi Dan Bahan Bacaan Lainnya

<https://alamsumatra.wordpress.com/2009/02/21/hutan-rawa-gambut-zamrud-siak/> Diakses Tanggal 12 Mei 2016 19.35 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan;